

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI KANTIN KEJUJURAN DI SMA ANTARTIKA SIDOARJO

Erlinda Fatimah

(S-1 PPKn, FISH, UNESA) erlindafatimah15@gmail.com

Harmanto

(PPKn, FISH, UNESA) harmanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo, mengetahui hubungan yang terjalin antara perspektif *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* dalam penerapannya di kantin kejujuran SMA Antartika Sidoarjo, dan mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapan kegiatan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, dimana data didapatkan dengan kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam kepada guru dan siswa. Lokasi penelitian ini di SMA Antartika Sidoarjo. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif data yaitu, data dijabarkan dalam beberapa kategori dan analisis korelasi untuk dapat mengetahui hubungan yang terjadi antar kategori dengan menggunakan teori pendidikan karakter oleh Thomas Lickona. Ada tiga hal yang dapat menentukan karakter seseorang yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behaviour*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hubungan yang terjadi antara kategori yang diteliti juga menunjukan hal yang baik. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral feeling* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.876, *moral knowing* dengan *moral action* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.764, *moral feeling* dengan *moral action* adalah sebesar 0.864 maka, hubungan tiap kategori kuat. Dalam pelaksanaan dari kantin kejujuran sudah baik dilihat dari persentase nilai pelaksanaan tiap kategori yang mencapai rata-rata 80%. Dalam pelaksanaan, para peserta didik sudah melaksanakan kegiatan dengan baik karena para peserta didik menggunakan moral sebagai dasar dalam berperilaku, adanya hubungan yang kuat antar kategori yang diteliti, serta ditemukannya beberapa tantangan yang harus dihadapi sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Karakter, Thomas Lickona

Abstract

The study aims to describe the application of the honesty canteen at the Antarctica Sidoarjo High School, to determine the relationship between the perspectives of moral knowing, moral feeling, and moral behavior in its application in the honesty canteen of SMA Antarctica Sidoarjo, and to find out the challenges faced in implementing honesty canteen activities at SMA Antartika Sidoarjo. The approach used is quantitative and qualitative, where data were obtained by questionnaires, observations, and interviews with teachers and students. The location of this research in SMA Antartika Sidoarjo. The data collected were analyzed using descriptive data analysis, the data explained in several categories and correlation analysis to determine the relationship between categories using Thomas Lickona's theory of character education. There are three things that can determine a person's character are moral knowing, moral feeling, dan moral behaviour. For the relationship between the moral knowing and moral feeling categories a correlation coefficient of 0.876, moral knowing and moral action a correlation coefficient of 0.764, moral feeling and moral action categories a correlation coefficient of 0.864 then, the relationship between each category is strong. In the implementation of the honesty canteen is good seen from the percentage value of the implementation of each category which reaches an average of 80%. In practice the students have carried out the activities well because students use morals as a basis behavior, there was a strong relationship between the categories studied, as well as the discovery of several challenges that must be faced in order to provide maximum result.

Keywords : Corruption, Character Knowledge, Thomas Lickona

PENDAHULUAN

Hingga saat ini bangsa Indonesia masih tetap dalam satu permasalahan yang belum terselesaikan dan telah menjadi suatu masalah yang pelik yaitu terkait dengan dekadensi moral dari kenakalan remaja hingga kasus korupsi yang masih marak terjadi baik dilakukan di lingkungan pemerintah ataupun di luar lingkungan pemerintahan

(Shobirin, 2016). Korupsi sudah menjadi masalah dan jika diibaratkan kegiatan korupsi ini sudah menjadi penyakit kronis yang harus diselesaikan dan jika tidak, akan mulai menggerogoti bangsa ini. Karena korupsi ini akan menjadi suatu hal yang akan ditiru oleh generasi-generasi selanjutnya karena sudah dianggap menjadi suatu kultur yang tertanam di negara Indonesia ini.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena banyak pelaku korupsi diputus bebas, ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Menyinggung tentang korupsi, korupsi dapat membawa dampak yang begitu besar bagi negara. Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Dimana korupsi merupakan suatu perbuatan menyelewengkan sesuatu yang bukan haknya baik uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya. Korupsi terjadi di Indonesia sangat sering sekali. Termasuk didalamnya terdapat para pejabat atau petinggi negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut membawa persepsi masyarakat bahwa pejabat negara lah sumber atau akar dari permasalahan korupsi di negeri ini (Ade, 2017).

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan sepanjang waktu. Beberapa produk hukum telah diterbitkan baik dari aspek hukum materiil maupun dari aspek hukum formil. Pada tahun 2002 Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuknya KPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi agar lebih efisien. Mengingat pada tahun 2002 upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi masih lemah (Gusti, 2015). Sejak berdirinya KPK banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sudah ditangani maka, dengan begitu seharusnya dibarengi dengan usaha masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk membebaskan Indonesia dari tindak korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2020 terdapat 169 kasus yang ditangani selama periode semester satu di tahun 2020. Dari 169 kasus yang ditangani terdapat 139 diantaranya yang merupakan kasus korupsi baru. Terdapat 23 pengembangan kasus dan 23 operasi tangkap tangan dengan tersangka yang ditetapkan yaitu mencapai 372 orang dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun. Kasus korupsi yang ditangani tersebut yaitu berupa kasus suap dengan nilai

yang diketahui dan ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp.20,2 miliar dan kasus pungutan liar dengan total mencapai Rp.40,6 miliar. Menurut catatan ICW tren peningkatan kasus korupsi di Indonesia menurun apabila dibandingkan pada tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 mencapai 271 kasus (Sania, 2020).

Berdasarkan hasil survei lain skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2020, diketahui indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada skor 37, yang mana turun tiga poin dari tahun 2019 dengan ranking 102 dari 180 negara yang terlibat (*Transparency International Indonesia*, 2020). Dalam laporan TII diketahui salah satu indikator dalam penegakan hukum Indonesia mengalami kenaikan namun, perbaikan layanan atau birokrasi dengan hubungannya dengan korupsi masih stagnan, yang mana bahwasannya faktor politik masih mendominasi terjadinya kasus korupsi di Indonesia (Suyatmiko, 2020).

Berdasarkan dengan data di atas bisa dilihat bahwa tindakan korupsi di Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini. Walaupun data didapatkan dari laporan TII tersebut menunjukkan penurunan tetapi tetap saja saat ini korupsi menjadi masalah yang belum terselesaikan. Korupsi yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintah dilakukan dengan tujuan bahwa nantinya para pejabat tersebut akan mendapat keuntungan yang besar dari tindakan tersebut walaupun merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Upaya preventif sangat penting untuk dilakukan demi tercapainya negara yang bebas dari korupsi. Untuk itu diperlukan kerja sama antar komponen masyarakat dengan pemerintah. Salah satu cara yang digunakan sebagai pencegahan atau upaya preventif yaitu melalui Pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dilakukan sebagai upaya pencegahan awal yang dilakukan melalui lembaga sekolah sebagai usaha sadar dalam mencegah terjadinya tindak korupsi sejak dini (Gernung, 2014:94). Pencegahan tindak korupsi sejak dini sangat penting untuk dilakukan mengingat para peserta didik di sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya diharapkan dengan adanya Pendidikan antikorupsi dapat sebagai pegangan dalam melakukan suatu hal yang mengindikasikan tindakan korupsi.

Melihat korupsi yang masih tinggi di negeri ini, pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi diwujudkan dengan diterbitkannya instruksi presiden (Inpres) 17/2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai tambahan pemerintah juga memasukkan upaya baru, yakni melalui pendidikan dan budaya anti korupsi. Wacana mengenai pendidikan antikorupsi diharapkan dapat menjadi cara yang relevan untuk menekan tindak pidana korupsi yang sudah

membudaya di Indonesia. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk posisi sipil peserta didik dalam melawan korupsi. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Hal lain yang menjadi menarik adalah saat ini masih terdapat generasi muda yang tidak tahu apa saja yang bisa disebut dengan tindakan korupsi, banyak generasi muda yang meluh tau bahwa tindakan korupsi bukan hanya tentang mengambil uang yang bukan miliknya tetapi juga banyak hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak tepat waktu dan tidak mengerjakan tugas yang menjadi kewajibannya tersebut.

Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dan untuk dapat merubahnya untuk merubah baik dari mindset, kebiasaan, dan sikap tersebut harus dapat diubah melalui proses yang bertahap karena untuk dapat merubah suatu hal khususnya kebiasaan diperlukan suatu proses yang bertahap yang tidak bisa langsung berubah dalam waktu yang singkat, sehingga pemerintah mengusulkannya berupa pemberian pendidikan terkait dengan pemberantasan korupsi.

Karena pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses yang mampu untuk dapat mengembangkan karakter, sikap, pengetahuan dan keterampilan serta potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut, maka pendidikan ini menjadi salah satu jalan untuk dapat membangun dan meningkatkan kualitas karakteristik para penerus bangsa (Aziizu, 2015). Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke empat, dimana pada alinea tersebut terdapat cita-cita bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, dalam hal ini bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui pendidikan yang baik. Melalui pendidikan juga dapat membentuk karakter dan moral anak menjadi lebih baik.

Lembaga sekolah merupakan tempat terbaik dan strategis dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi karena peserta didik akan menjadi tulang punggung bangsa di masa depan maka, sejak dini harus dibekali untuk melawan dan menjauhi Tindakan-tindakan yang mengindikasikan praktik korupsi (Handoyo, 2010). Diharapkan peserta didik dapat turut aktif memerangi

tindak korupsi melalui pengajaran dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga sekolah. Melalui pendidikan peserta didik dapat mengubah sikap dan perilaku secara sadar untuk membentuk karakter sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana karakter merupakan cerminan diri yang dapat dinilai oleh orang lain dan menentukan kualitas diri. Karakter merupakan suatu usaha yang tertanam dalam diri yang dilakukan sesuai dengan nilai inti yang ada dalam suatu kehidupan sosial masyarakat menurut Thomas Lickona (dalam Darmadi, H, 2007).

Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan para peserta didik akan memperoleh wawasan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang hina sehingga diharapkan para peserta didik akan mempunyai mindset tidak akan melakukan perbuatan korupsi sekecil mungkin karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang hina atau kotor, dengan adanya pendidikan antokorupsi diharapkan pula para dapat membentuk moral peserta didik. Moral peserta didik akan terbentuk melalui pembiasaan – pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah dalam menanamkan pendidikan antikorupsi sehingga dalam diri peserta didik akan tertanam karakter antikorupsi dan tidak akan melakukan perbuatan korupsi dalam bentuk apapun karena dalam diri peserta didik sudah terdapat pengetahuan moral dan tindakan moral menurut Thomas Lickona (dalam Darmadi, H, 2007).

Penerapan pendidikan antikorupsi tidak dalam bentuk sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum dalam mata peajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan karena tidak mungkin bahwa pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata pelajaran sendiri Karena akan susah dalam mencari tenaga pendidik atau guru yang akan mengajarkan pendidikan antikorupsi itu sendiri. Pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pembelajaran di sekolah yaitu berupa nilai – nilai yang harus ditanamkan pada diri peserta didik oleh guru sekolah. Nilai-nilai antikorupsi diantaranya yitu, disiplin, tanggung jawab, mandiri, peduli, sederhana, mandiri, berani dan adil (Kementerian pendidikan dan kebudayaan).

Maka didasarkan dengan hal tersebut pendidikan antikorupsi sudah menjadi prioritas untuk dapat diterapkan dan ditanamkan kepada para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dan sangat perlu direalisasikan karena saat ini saja masyarakat memiliki pemikiran bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya bangsa (Gunarto, 2017). Sehingga penindakan kejahatan korupsi sudah menjadi hal yang lumrah untuk disiarkan dan dilakukan oleh kalangan pejabat di negeri ini. Bahkan saat ini kegiatan korupsi sudah menjalar hingga masyarakat dari umur kecil hingga dewasa,

contohnya siswa yang saat ini masih sering melakukan budaya menyontek dan orang dewasa sebagai pekerja yang tidak bertanggung hingga terlambat dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan tanggung jawab kepadanya.

Maka sangat perlu untuk segera diterapkan oleh lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah dalam merencanakan kegiatan tersebut memerlukan strategi atau cara-cara khusus untuk menerapkan dan menanamkan karakter antikorupsi pada peserta didik, mengingat peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang harus di didik sejak dini untuk membentuk moral peserta didik sehingga nantinya peserta didik akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan adanya pendidikan antikorupsi peserta didik akan mengerti tindakan-tindakan apa saja yang akan merujuk dalam tindakan korupsi sehingga dengan adanya pendidikan antikorupsi peserta didik akan menghindari perbuatan korupsi karena moral peserta didik sudah terbentuk sejak dini (Ariawan, 2018).

Sudah saatnya korupsi untuk diperangi agar tidak merusak generasi penerus bangsa dan membuat nama bangsa yang agung ini tercoreng oleh perbuatan para koruptor, maka untuk memerangi kasus korupsi yang marak terjadi di negeri ini tidak hanya diperlukan lembaga atau badan pemberantas korupsi saja. Namun, negara juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memerangi korupsi. Dimana lembaga pendidikan akan berperan dalam ranah pendidikan yaitu membuat kurikulum pendidikan antikorupsi, yang mana bahwasannya dalam kurikulum pendidikan antikorupsi memuat nilai – nilai yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik untuk membentuk karakter antikorupsi pada peserta didik sehingga dapat membentuk moral peserta didik (Ridwan, 2015).

Pendidikan antikorupsi sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No.23 Tahun 2006 mengenai standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah. Sudah selayaknya kurikulum antikorupsi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sekolah seperti yang dinyatakan dalam permendiknas tersebut, yang mana bahwasannya pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan pengembangan kurikulum yang termasuk dalam kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sehubungan dengan adanya permendiknas diatas kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan sosialisasi Pendidikan dan pemahaman antikorupsi sejak dini melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa

Masuk Pesantren (JMP). Program tersebut dijalankan secara berkelanjutan dan rutin dengan sasaran yang dituju adalah pelajar baik tingkat SD, SMP DAN SMA. Program JMS dan JMP terdiri atas beberapa sub program yang salah satunya yaitu sosialisasi mengenai pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini yang telah dilakukan pada awal tahun 2018 (Khilid, 2018).

Sehubungan dengan adanya aturan pemerintah yang diwujudkan melalui Inpres No.17 Tahun 2011 dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Kabupaten Sidoarjo perlu diterapkannya Pendidikan antikorupsi pada sekolah untuk menanamkan jiwa antikorupsi pada peserta didik sejak dini. SMA Antartika telah lebih dahulu menerapkan pendidikan anti korupsi pada tahun 2013 yang pada mulanya diwujudkan dengan adanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran merupakan suatu kegiatan, dimana sekolah menyediakan kantin sebagai tempat siswa dan siswa berbelanja tanpa adanya pengawasan dari sekolah tersebut. Kantin ini berbeda dengan kantin pada umumnya, kantin ini dilaksanakan tanpa adanya pengawasan secara langsung dari pihak sekolah. Pihak sekolah hanya memfasilitasi tempat, produk yang dijual, list harga, dan tempat untuk menaruh uang sesuai dengan harga produk yang dibeli.

Kantin kejujuran dibentuk atas dasar adanya anjuran dari pemerintah kabupaten Sidoarjo, yang mana bahwasannya pemerintah memiliki program pembentukan karakter yang terdiri atas beberapa sub program didalamnya. SMA Antartika dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan sub program yang diwujudkan dalam bentuk kantin kejujuran sebagai wujud program pembentukan karakter.

SMA Antartika menjalankan kantin kejujuran tersebut pada awalnya mendapatkan dana dari pemerintah untuk kemudian di kelola oleh sekolah. Untuk mengontrol kesuksesnya kantin kejujuran tersebut pemerintah kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa kali sidak terhadap SMA Antartika untuk memastikan keeksistensian kantin kejujuran tersebut. SMA Antartika telah sukses menjalankan kantin kejujuran tersebut. Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir kantin kejujuran tersebut mengalami sepi pembeli. Faktor penyebab sepiya pembeli pada kantin kejujuran tersebut yaitu ; pertama, adanya renovasi sekolah pada tahun 2019 sehingga penempatan kantin kejujuran tidak lagi erada pada tempat yang seharusnya dan cenderung berantakan. Kedua, disebabkan karena adanya pandemic covid-19, yang mana kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan secara online sehingga pembeli kantin kejujuran tersebut hanya dari kalangan guru dan staf sekolah saja.

Maka didasarkan terhadap kegiatan penerapan anti korupsi yang telah dijalankan oleh SMA Antartika dari tahun 2013, penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk

dapat mengetahui penerapannya secara langsung di sekolah tersebut, dimana nantinya didapatkan informasi baik berupa keunggulan dan kendala yang terjadi dari penerapan kantin kejujuran tersebut dan dapat menjadi faktor yang dapat direncanakan juga pada sekolah di daerah Sidoarjo.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan diharapkan membawa manfaat secara teoritis sebagai sarana referensi dan edukasi mengenai penerapan pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan moral pada peserta didik di SMA Antartika Sidoarjo melalui program kantin kejujuran. Manfaat praktis pada penelitian adalah sebagai bahan informasi, diskusi, evaluasi, dan rekomendasi dalam upaya menerapkan pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan moral pada peserta didik di SMA Antartika Sidoarjo.

Berbagai studi terkait penerapan pendidikan antikorupsi telah dilakukan oleh beberapa ahli dari pandangan yang berbeda. Misalnya Nur (2021), serta Widyastono (2013), Sutrisno (2017). Ketiga tokoh tersebut mencermati mengenai penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah melalui beberapa strategi. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada cara-cara yang dilakukan yang sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi kepada siswa-siswi di sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastono penerapan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan cara : 1) menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah yang transparan, akuntabel, dan profesional; 2) mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran, khususnya muatan lokal; 3) diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan pendidikan antikorupsi tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penelitian Sutrisno, dilakukan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi pada budaya sekolah, dan menjadikan guru sebagai model dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai antikorupsi sebagai media penanaman dalam diri siswa. Nur, menemukan bahwa guru harus dapat mengetahui strategi untuk mengatasi siswa yang bermasalah terkait dengan masalah kejujuran dan memberikan reward bagi siswa yang berlaku jujur.

Selanjutnya, Hasan (2015), Suryani (2013), dan Uswatun (2018) mencermati terkait penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi melalui pendidikan formal. Perbedaan mendasar diantara ketiga tokoh tersebut yaitu terletak pada praktik terkait penerapan pendidikan antikorupsi. Misalnya Hasan (2015), dalam penelitian yang dilakukan pendidikan antikorupsi sangat perlu untuk dilakukan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Penerapan dilakukan dengan menguatkan budaya antikorupsi pada mahasiswa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Suryani

(2013), mencermati bahwa dalam kalangan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara melakukan, sosialisasi, kampanye, dan seminar sebagai praktik penerapan pendidikan antikorupsi. Uswatun (2018) dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan pendidikan antikorupsi tingkat perguruan tinggi se Kalimantan Barat dilakukan dengan cara disisipkan dalam mata kuliah yang relevan.

Berbagai studi diatas mencermati terkait dengan penerapan pendidikan antikorupsi melalui penyisipan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam mata pelajaran yang relevan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji mengenai penerapan pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara terpadu melalui berbagai cara yang dilakukan oleh sekolah dengan memfokuskan penerapan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran sebagai pembelajaran diluar kegiatan belajar mengajar dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan, motivasi, serta praktik siswa dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

Untuk mengkaji substansi tersebut Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori dari Thomas Lickona, yang mengatakan bahwa pendidikan karakter menjadi suatu yang harus diperhatikan di tiap negara karena pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan para generasi yang berkualitas, hal tersebut dilakukan bukan demi individu saja tetapi juga dilakukan untuk kepentingan warga secara keseluruhan. Pendidikan karakter tersebut diartikan sebagai *the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development* sehingga pendidikan karakter ini menjadi usaha dengan unsur kesengajaan dari dimensi sosial dengan tujuan membentuk karakter secara optimal.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter ini sangat berkaitan erat dengan adanya konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behaviour*). Berdasarkan dengan ketiga komponen tersebut dipertegas lagi bahwa karakter dapat dikatakan baik jika didukung dengan adanya pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan keinginan untuk dapat melakukan sesuatu hal yang dikategorikan baik.

Moral Knowing, pengetahuan Moral adalah pengetahuan tentang moralitas, sedangkan perasaan moral adalah rasa moralitas dan moral tindakan adalah tindakan moral. Pengetahuan moral merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Pengetahuan moral terdiri dari enam ini kesadaran moral bangsa, yaitu, kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, penalaran moral, keputusan membuat, dan pengetahuan diri.

Moral Feeling adalah sumber energi dari manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral. Ada enam hal-hal yang merupakan aspek emosi dan mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia tanpa

karakter yaitu, hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, dan kemanusiaan.

Moral Action/Behaviour, tindakan moral adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan akhlak adalah hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk bertindak secara moral, maka harus dilihat dari tiga aspek lainnya yaitu kompetensi, kemauan, dan kebiasaan.

METODE

Didasarkan dengan judul dalam penelitian ini yaitu "Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo" maka penelitian menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif dengan desain penelitian tindakan. Penggabungan dari kedua jenis penelitian tersebut tidak lain karena data yang akan diambil akan berupa data angka dan juga narasi yang didapatkan dari responden dan informan pada penelitian ini.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berfokus kepada analisis data yang didapatkan berupa angka (numerik) yang nantinya output yang dihasilkan dapat diketahui. Sedangkan penelitian kualitatif memberikan penjelasan terkait dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi dilapangan dalam bentuk narasi. Nana Syaodih (2015:72) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mendasar yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena-fenomena yang ada dalam lokasi penelitian secara detail dan mendalam. Penelitian tindakan dilakukan untuk mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sempit yang berkaitan dengan perilaku individu Carr dan Kemmis (dalam Natawijaya, 1977:2).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yang akan di teliti dilapangan antara lain, 1) untuk dapat mengetahui penerapan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo yang dilihat dari perspektif *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* 2) untuk mengetahui hubungan yang terjalin antara perspektif *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* dalam penerapannya di kantin kejujuran SMA Antartika Sidoarjo. 3) untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapan kegiatan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo

Prosedur penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kuantitatif, antara lain yaitu kuesioner, wawancara dan juga observasi. Sehingga data yang didapatkan nantinya akan dilakukan analisis yang didasarkan kepada teori Thomas Lickona dalam penerapan kantin kejujuran yang berada di SMA Antartika. Adapun juga teknik pengumpulan data

kualitatif yang digunakan yaitu teknik pengumpulan wawancara dengan harapan bahwa data yang dihasilkan oleh penelitian kuantitatif akan sama dengan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hanya menggunakan siswa sebagai responden, teknik pengumpulan data wawancara menggunakan guru sebagai tenaga pengajar dan juga murid sebagai peserta didik untuk dapat memberikan pendapatannya, pengalamannya, dan juga kritik terkait dengan pelaksanaan kegiatan kantin kejujuran.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data, dimana nantinya data yang didapatkan di jabarkan dalam beberapa kategori sesuai dengan teori yang digunakan dan juga analisis korelasi untuk dapat mengetahui hubungan yang terjadi antara kategori-kategori pada teori yang digunakan dalam penerapannya di SMA Antartika Sidoarjo.

Uji validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini diperlukan untuk dapat mengetahui keabsahan data yang didapatkan dalam penelitian ini serta instrumen yang dilakukan. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk dapat menentukan seberapa tepatnya data yang didapatkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek tersebut. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk dapat mengukur seberapa besar koherensi yang terjadi antara instrumen atau variabel yang digunakan untuk dapat menunjukan gejala yang sama antara instrumen tersebut. Pengujian dalam hal ini adalah untuk menunjukan seberapa konsistensinya jika digunakan untuk dapat mengukur konsep dalam suatu kondisi dengan kondisi lainnya.

Dimana data yang telah didapatkan hasil kuesioner tersebut nantinya akan di uji validitasnya dan konsistensinya dan jika telah teruji nantinya data tersebut bisa digunakan dalam penelitian ini serta melalui tahap-tahap analisis yang telah ditentukan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas Data

Dalam menguji validitas data yang didapatkan peneliti menggunakan SPSS 23, dengan syarat pengambilan keputusan jika nilai Sig. (2-tailed) memiliki nilai lebih kecil dari pada 0,05 maka item tersebut dinyatakan valid. dimana dalam penelitian ini menggunakan 100 sampel sebagai responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui penerapan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo. Uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Uji Validitas

Kategori	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation
<i>Moral Knowing</i>	.000	.507**
<i>Moral Feeling</i>	.000	.499**
<i>Moral Action</i>	.000	.599**

Sumber : Pengolahan data, 2021

Berdasarkan dengan tabel di atas didapatkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada tiap kategori, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* sebesar 0.000 yang berarti memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 atau $0.000 < 0.05$ dan berdasarkan dengan syarat pengambilan keputusan ditetapkan bahwa data yang digunakan adalah valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk dapat mengukur seberapa konsisten instrument yang digunakan dalam suatu penelitian, dalam uji reliabilitas ini terdapat syarat pengambilan keputusan, yaitu jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari pada 0,6 atau > 0.6 maka data yang digunakan tersebut terbukti reliabel atau konsisten. Dengan SPSS 23 maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Kategori	Cronbach's Alpha
<i>Moral Knowing</i>	.673
<i>Moral Feeling</i>	.756
<i>Moral Action</i>	.668

Sumber : Pengolahan data, 2021

Berdasarkan dengan tabel uji reliabilitas didapatkan bahwa pada kategori *moral knowing* memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.673 yang berarti lebih besar dari 0.6 atau $0.673 > 0.60$ dan berdasarkan syarat pengambilan keputusan bahwa kategori *moral knowing* reliabel atau konsisten. Pada kategori *moral feeling* memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.756 yang berarti lebih besar dari 0.6 atau $0.756 > 0.60$ dan berdasarkan syarat pengambilan keputusan bahwa kategori *moral feeling* reliabel atau konsisten. Pada kategori *moral action* memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.668 yang berarti lebih besar dari 0.6 atau $0.668 > 0.60$ dan berdasarkan syarat pengambilan keputusan bahwa kategori *moral moral action* atau konsisten

Deskripsi Data Tiap Kategori

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 siswa baik perempuan dan laki-laki di SMA Antartika Sidoarjo untuk dapat mengetahui tingkat moral mereka terkait dengan pelaksanaan kantik kejujuran yang telah dimulai sejak 2013 tersebut. Dalam kuesioner tersebut peneliti menekankan kepada kategori-kategori yang terdapat pada teori Thomas Lickona yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dari hasil kuesioner kami membagi hasilnya menjadi 5 nilai

dalam skala ordinal, yang menjelaskan tingkatan moral pada tiap kategori, yang dijabarkan sebagai berikut :

1 = Sangat Buruk

2 = Buruk

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Sangat Baik

Setelah penyebaran kuesioner didapatkan hasil dari data tersebut, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Jumlah Nilai Tiap Kategori

Kategori \ Nilai	Nilai					Total
	1	2	3	4	5	
<i>Moral Knowing</i>	0	0	29	42	29	100
<i>Moral Feeling</i>	0	0	34	28	38	100
<i>Moral Action</i>	0	0	33	34	33	100

Sumber : Pengolahan data, 2021

Berdasarkan dengan hasil pengolahan data diatas didapatkan bahwa seluruh responden sudah mengisi jawaban tiap kategorinya. Dari data di atas didapatkan bahwa untuk kategori *moral knowing* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan pengetahuan moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29% , nilai 4 (baik) 42%, dan nilai 5 (sangat baik) 29% . untuk kategori *moral feeling* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan hati Nurani dan empatinya terkait pelaksanaan kantin kejujuran tersebut dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 34%, nilai 4 (baik) sebesar 28%, dan untuk nilai 5 (sangat baik) sebesar 38%. Dan terakhir pada kategori *moral action* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan tindakan yang bersifat moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 33%, nilai 4 (baik) 34%, dan nilai 5 (sangat baik) 33% .

Tabel 4 Persentase Tiap Kategori Terhadap Total Maksimum

Kategori	Total Nilai	Total Maksimum	Persentase
<i>Moral Knowing</i>	400	500	80%
<i>Moral Feeling</i>	404	500	81%
<i>Moral Action</i>	400	500	80%

Sumber : Pengolahan data, 2021

Berdasarkan dengan nilai diatas didapatkan persentase yang dihasilkan melalui rumus :

$$\text{Persentase} = \text{Total nilai} / \text{total maksimum nilai}$$

Untuk total nilai sendiri yang diharapkan yaitu sebesar 500 dari 100 jumlah responden yang digunakan. Dan berdasarkan pengolahan data yang didapatkan pada kategori *moral knowing* didapatkan siswa telah melaksanakannya hingga 80% dari nilai total maksimum yang seharusnya. Untuk kategori *moral feeling* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan hati nurani dan empatinya sebesar 81%, dan terakhir untuk kategori *moral action* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan nilai moral yang baik sebesar 80% dari total nilai maksimum. Dan berdasarkan dari hal tersebut terkait dengan kantin kejujuran tersebut para siswa lebih mengedepankan hati nuraninya dan empatinya dalam melaksanakan kantin kejujuran dan juga untuk kategori sudah memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 80%, sehingga dalam menjalankan kegiatan kantin kejujuran ini siswa sudah memiliki pengetahuan moral dan juga menerapkannya pada kantin kejujuran yang dilaksanakan di SMA Antartika Sidoarjo.

Hubungan Antar Kategori

Dalam pelaksanaan kantin kejujuran sudah didapatkan persentase pelaksanaan tiap kategorinya dimana tiap kategori sudah menunjukkan nilai persentase yang cukup besar di nilai didominasi oleh nilai sedang hingga sangat baik dan tidak terdapat nilai sangat buruk dan buruk. Setelah mengetahui nilai tiap kategori maka selanjutnya akan dicari hubungan yang terjadi pada tiap kategori yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan , *moral action*. Dalam korelasi terdapat beberapa tingkat korelasi yang terjadi dengan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 Interval Koefisien Korelasi

Nilai Koefisien	Status Korelasi
0.00 - 0.20	Sangat Lemah
0.21 - 0.40	Lemah
0.41 - 0.70	Sedang
0.71 - 0.90	Kuat
0.91 - 1.00	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2010)

Tabel 6 Korelasi Tiap Kategori

Kategori	Moral Knowing	Moral Feeling	Moral Action
<i>Moral Knowing</i>	1	0.876	0.764
<i>Moral Feeling</i>	0.876	1	0.864
<i>Moral Action</i>	0.764	0.864	1

Sumber : Pengolahan data, 2021

Berdasarkan dengan hasil analisis korelasi didapatkan tingkat hubungan tiap kategorinya, dan disesuaikan dengan tabel tingkat korelasi interval koefisien di atas. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral feeling* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.876 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi

maka hubungan antara kategori tersebut adalah Kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral action* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.764 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral feeling* dengan *moral action* adalah sebesar 0.864 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat.

Sehingga didapatkan bahwa hubungan antara tiap kategori dari teori Thomas Lickona berhubungan kuat pada pelaksanaan kegiatan kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo.

Hasil Wawancara dengan Guru

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan menggunakan informannya adalah guru SMA Antartika Sidoarjo dan juga Murid SMA Antartika Sidoarjo. Sehingga nantinya didapatkan hubungan juga antara hasil kuesioner dengan hasil wawancara yang dilakukan ini. Dan berikut hasil wawancara yang didapatkan dengan guru SMA Antartika Sidoarjo. :

Bapak Mudjiani selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum menjelaskan bahwa pihak SMA Antartika Sidoarjo mendapatkan suntikan dana awal sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dana tersebut kemudian dikelola oleh pihak sekolah dalam bentuk membeli perlengkapan seperti etalase, dan melengkapi barang-barang yang akan dijual di kantin kejujuran. Bapak Muslimin menjelaskan bahwasanya:

“...Dana awal dari pemerintah sekitar RP.4.000.000 untuk dibelikan etalase dan perlengkapan barang-barang yang akan dijual di kantin kejujuran...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Berdasarkan pernyataan Bapak Muslimin di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah berhasil mengembangkan dana yang diberikan pemerintah di awal, sebab hingga saat ini kantin kejujuran masih bertahan sekaligus memberikan citra adanya perilaku positif semua warga sekolah pada kantin kejujuran.

Sementara itu, Ibu Endang Isdrijatilowati selaku guru sekaligus pengelola kantin kejujuran menambahkan bahwa disamping dibukanya kantin kejujuran, SMA Antartika Sidoarjo juga menyelenggarakan kegiatan pendukung lain sebagai pengembangan program seperti sosialisasi dengan menggandeng pihak eksternal. Ibu Endang Isdrijatilowati menambahkan bahwasanya:

“...Untuk kantin kejujuran, dananya dari pemerintah karena masuk pada program pemerintah. Kemudian jika ada kegiatan seperti sosialisasi dan sebagainya, itu menggunakan dana sekolah...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara pada Ibu Endang di atas dapat disimpulkan bahwa selain kantin kejujuran, pembelajaran di luar kelas juga diwujudkan dengan kerjasama pihak sekolah dan pihak eksternal dalam melakukan sosialisasi yang memuat nilai pendidikan antikorupsi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mudjaini tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Elfrida selaku guru yang juga pengelola kantin kejujuran bahwasanya:

“...Awalnya kan ada program dinas pendidikan kurikulum berkarakter, ada beberapa sub-sub program didalamnya yang salah satunya itu kantin kejujuran. Antartika menjadi salah satu sekolah yang dipilih dinas untuk menjalankan kantin kejujuran. Sekolah diberikan dana awal untuk kemudian dibelikan perlengkapan kantin kejujuran itu...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Berdasarkan pernyataan Ibu Elfrida di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kantin kejujuran dapat mendukung upaya sekolah dalam melakukan pendidikan karakter yang berkualitas.

Penerapan pendidikan antikorupsi dilatarbelakangi oleh pentingnya penanaman karakter jujur dalam diri seorang, tidak hanya peserta didik namun seluruh warga sekolah.

Pada pelaksanaannya, kebijakan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo melibatkan beberapa agen, yakni seluruh warga sekolah, dimulai dari kepala sekolah, guru, staf dan karyawan, serta peserta didik sebagai faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga terdapat kerjasama dengan pihak luar, yakni Kepolisian Resort Sidoarjo yang memberikan sosialisasi-sosialisasi yang didalamnya terintegrasi pendidikan karakter untuk memberikan pemahaman mengenai perbuatan yang salah dan yang benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Ita Ratnasari selaku Guru PPKn bahwasanya:

“...Agen-agen yang terlibat dalam pendidikan antikorupsi adalah seluruh warga sekolah. Dibutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh warga sekolah, di mulai dari guru, staf dan karyawan, serta peserta didik-siswi di sekolah. Jika kerja sama tersebut dapat bersinergi maka, secara otomatis program-program apapun yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan...” (Wawancara, Jumat 16 April 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh warga sekolah berkontribusi dalam pendidikan antikorupsi, sehingga adanya sinergi tersebut diharapkan dapat mencapai hasil sesuai tujuan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keberhasilan suatu kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini diperlukan sikap agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Apabila para agen pelaksana memiliki sikap yang positif maka, kebijakan tersebut akan dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo, peneliti juga berfokus terhadap faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian mendapati temuan bahwa faktor pendukung pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo dapat diidentifikasi melalui dukungan dan partisipasi aktif warga sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ita Ratnasari selaku Guru PPKn. Ibu Ita menjelaskan bahwasanya:

“...Pendukungnya para warga sekolah dapat bekerja sama dengan baik, berpartisipasi aktif ketika ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah apapun bentuknya. Penghambatnya tentu kami para guru masih belum bisa mengontrol dengan baik semua siswa karena masih ada saja yang tidak jujur, dan sebagainya...” (Wawancara, Jumat 16 April 2021)

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Mudjaini selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum jika dukungan yang diberikan warga sekolah pada program pendidikan antikorupsi sebagai media pembelajaran. Bapak Mudjaini menjelaskan bahwasanya:

“...Warga sekolah terus mendukung adanya pendidikan antikorupsi sebagai media untuk mengenalkan kepada anak-anak itu korupsi dan sebagai upaya pencegahan korupsi. Hambatannya ya Kembali lagi masih ada segelintir anak yang masih berperilaku kurang berkarakter baik...” (Wawancara, Senin 19 April 2021)

Pernyataan yang disampaikan Bapak Mudjaini di atas juga didukung oleh pernyataan Ibu Elfrida selaku guru sekaligus pengelola kantin kejujuran bahwasanya:

“...Bentuk dukungan yaitu para guru sudah melakukan tugasnya dengan baik, mengajarkan materi pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat, anak-anak juga senang ada fasilitas kantin kejujuran yang letaknya strategis jadi tidak perlu jauh-jauh untuk membeli alat tulis dan makanan kecil...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa faktor pendukung dalam penerapan pendidikan antikorupsi yaitu adanya kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Mulai dari para guru memberikan contoh bagaimana perilaku yang menunjukkan karakter yang baik seperti, datang ke kelas dengan tepat waktu, adanya fasilitas penunjang pembelajaran, dan adanya

partisipasi aktif dari guru dan peserta didik dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Ibu Elfrida selaku guru sekaligus pengelola kantin kejujuran menjelaskan bahwasanya:

“...Bentuk dukungan yaitu para guru sudah melakukan tugasnya dengan baik, mengajarkan materi pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat, anak-anak juga senang ada fasilitas kantin kejujuran yang letaknya strategis jadi tidak perlu jauh-jauh untuk membeli alat tulis dan makanan kecil. Hambatannya masih ada beberapa anak yang datang terlambat, guru pun juga ada yang demikian masuk dan keluar kelas tidak sesuai dengan jam sekolah...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Adapun penghambat dalam proses penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo adalah masih adanya kinerja agen pelaksana yang belum maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Agen sekolah dalam hal ini peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kembali perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mudjaini. Sementara itu Ibu Norma Dwikorawati menambahkan bahwasanya:

“...Hambatannya ya karakter anak beda-beda tergantung bagaimana lingkungan tempat tinggal membentuknya, sehingga guru perlu cara yang kreatif untuk mendekatinya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga berbeda...” (Wawancara, Jumat 16 April 2021)

Hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya solusi yang tepat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ratnasari selaku guru PPKn bahwa solusinya selalu diingatkan terus-menerus, menegur, dan melakukan pendekatan hati ke hati. Hal ini dikarenakan setiap kesalahan yang dilakukan peserta didik tidak harus selalu dengan cara memarahi, menegur, tetapi kadang justru yang diperlukan peserta didik sebenarnya pendekatan-pendekatan seperti kekeluargaan. Dengan cara seperti itu peserta didik dapat menceritakan mengapa ia melakukan kesalahan tersebut, dan sebagainya. Sehingga guru bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Pernyataan yang dijabarkan oleh Ibu Ita Ratnasari juga didukung oleh pernyataan Bapak Mudjaini bahwasanya:

“...Untuk solusinya adalah terus-menerus diperingatkan, lebih dikuatkan lagi penanaman pendidikan karakter seiring berjalannya kegiatan belajar-mengajar. Para guru yang bertugas mengisi mata pelajaran di kelas juga berkewajiban untuk selalu mengingatkan para peserta didik. Karena memang peserta didik dari kalangan yang berbeda jadi masih wajar jika perilakunya juga berbeda-beda...” (Wawancara, Senin 19 April 2021)

Sementara itu pendapat lain yang sejalan dengan temuan penelitian diungkapkan oleh Ibu Elfrida yaitu:

“...Solusi yang diambil itu tergantung jenis hambatan yang dihadapi. Jika hambatannya cukup banyak, kami melakukan rapat bersama. Jika hambatannya skala nya kecil misal, perilaku peserta didik yang masih kurang berkarakter. Guru terus-menerus mengingatkan, menegur, dan ada sanksi yang tegas juga apabila perbuatannya sudah terlalu jauh melanggarnya...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Berdasarkan penjabaran di atas maka diketahui bahwa solusi dari adanya faktor penghambat tersebut adalah dengan melakukan rapat bersama, guru senantiasa mengingatkan dan memperkuat pendidikan karakter ditengah menyampaikan materi pelajaran di kelas, serta menjadwalkan ulang apabila terdapat sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak luar.

Hasil Wawancara dengan Siswa

Dalam melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan siswa SMA Antartika sebagai informan dalam penelitian ini, dan berikut wawancara yang telah didapatkan dari penelitian tersebut :

Menurut siswa kelas 3 yang bernama Surya, memberikan pendapatnya terkait dengan pelaksanaan kantin kejujuran yang dilaksanakan di SMA Antartika Sidoarjo tersebut. Surya memberikan pendapat bahwa :

“...Menurut saya, penerapan kantin kejujuran untuk sekolah menengah atas dimana salah satunya adalah SMA Antartika menjadi suatu kegiatan yang baik ya. Dimana saat ini Indonesia masih sering diberitakan para pejabatnya sering melakukan korupsi dan menurut beberapa orang tersebut adalah hal yang wajar. Maka menurut saya hal ini menjadi suatu langkah yang baik dan tetapi diberikan penyuluhan dan pengarahan terkait dengan kantin kejujuran ini...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Sama dengan pernyataan yang diberikan oleh siswa Farrel, Amanda selaku siswa kelas 2 pun memberikan pendapat bahwa :

“...saya sangat senang dengan adanya kantin kejujuran ini, bukan karena hal negative tetapi saya bisa membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab dengan adanya kantin kejujuran ini, walaupun dalam beberapa keadaan saya masih sering melihat anak yang mengambil makanan tanpa membayarnya. Tetapi untuk melatih dan membentuk suatu sikap kegiatan ini bagus untuk dilaksanakan...” (Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Farrel juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa temannya yang mengambil makanan tanpa membayar, walaupun yang dilakukan tidak setiap hari tetapi dilakukan jika mereka tidak memiliki uang saja, dan menurut Farrel bahwa hal tersebut walaupun beralasan tetapi tetap saja tidak bisa

dibenarkan juga. Farrel juga menekankan kepada sekolah mungkin dalam peningkatan kegiatan ini dapat ditambahkan dalam beberapa pelajaran yaitu penekanan kepada sikap kejujuran dan juga tanggung jawab seperti juga halnya melakukan ujian yang harus dilakukan dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Kegiatan ini juga perlu adanya pemberian pembelajaran yang berlandaskan kepada kemauan untuk mengembangkan dan mengubah dirinya.

Selanjutnya wawancara dilakukan juga kepada para siswa kelas 1 yang baru masuk pada sekolah tersebut. Hal tersebut dilandaskan kepada apakah sifat SMP yang sebelumnya akan dibawa juga pada kehidupan SMA ini. Maka dari hal tersebut kelas 1 juga diberikan pertanyaan terkait dengan kegiatan kantin kejujuran ini. Adi selaku kelas 1 menjadi informan dalam penelitian ini yang memberikan pengalamannya kepada kegiatan kantin kejujuran di SMA Antartika, sebagai berikut :

“...Awalnya saya tidak tahu dengan kegiatan ini, karena saya baru dan juga pada saat saya SMP tidak ada kegiatan seperti ini. Awalnya saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini, tetapi dalam pelaksanaannya beberapa orang mengambil makanan tanpa membayar. Hal tersebut membuat saya kaget karena mengapa di kegiatan kantin kejujuran ada orang yang melakukan hal yang tidak menunjukkan sikap jujur. Dalam pelaksanaannya saya juga merasa ada yang kurang karena sekolah tidak memberikan informasi dan pendidikan langsung terkait dengan adanya kegiatan ini...”
(Wawancara, Rabu 14 April 2021)

Tingkat Penerapan Peserta Didik di SMA Antartika Sidoarjo Terkait dengan Pelaksanaan Kantin Kejujuran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kantin kejujuran ini siswa sudah melakukan hal yang baik, mereka dalam kegiatan kantin kejujuran masih mengedepankan moral mereka dibandingkan dengan nafsu atau egois mereka. Walaupun berdasarkan kuesioner terdapat nilai yang belum sempurna tetapi sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dilihat pada persentase tiap skor 1 – 5 yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dengan hasil bahwa untuk kategori *moral knowing* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan pengetahuan moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29% , nilai 4 (baik) 42%, dan nilai 5 (sangat baik) 29% . untuk kategori *moral feeling* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan hati Nurani dan empatinya terkait pelaksanaan kantin kejujuran tersebut dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 34%, nilai 4 (baik) sebesar 28%, dan untuk nilai

5 (sangat baik) sebesar 38%. Dan terakhir pada kategori *moral action* didapatkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran siswa-siswa SMA Antartika cukup baik terkait dengan tindakan yang bersifat moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 33% , nilai 4 (baik) 34%, dan nilai 5 (sangat baik) 33%.

Hal tersebut diperkuat dengan menggunakan persentase nilai tiap kategori, yaitu kategori *moral knowing* didapatkan siswa telah melaksanakannya hingga 80% dari nilai total maksimum yang seharusnya. Untuk kategori *moral feeling* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan hati nurani dan empatinya sebesar 81%, dan terakhir untuk kategori *moral action* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan nilai moral yang baik sebesar 80% dari total nilai maksimum.

Hubungan Tiap Kategori Pada Teori Thomas Lickona

Dalam penerapannya hubungan antara tiap kategori dalam teori Thomas Lickona tersebut memiliki hubungan yang kuat antar kategorinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kantin kejujuran berjalan dengan baik karena para siswa masih mengedepankan moral dalam kegiatan kantin kejujuran tersebut.

Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral feeling* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.876 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah Kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral action* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.764 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral feeling* dengan *moral action* adalah sebesar 0.864 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat

Penerapan Pendidikan AntiKorupsi Pada Peserta Didik di SMA Antartika Sidoarjo

Pendidikan antikorupsi memiliki nilai urgensi yang dirasa sangat penting untuk diterapkan. Salah satunya melalui keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi secara kritis dan solutif. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan (2020) mengungkapkan perlaunya pendidikan antikorupsi dengan perspektif pedagogi kritis sebab hal ini dapat mendukung siswa dalam membentuk kesadaran dan pola pikir yang kritis.

Sementara itu pernyataan mengenai alasan pendidikan antikorupsi penting untuk diterapkan, adalah mengingat pendidikan antikorupsi dapat digunakan sebagai media untuk membentuk dan menguatkan karakter jujur sebagai

langkah awal dalam mencegah perbuatan tindak pidana korupsi, utamanya pada generasi muda (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Sementara itu adanya kantin kejujuran dapat menjadi media untuk melatih dan membiasakan anak untuk berperilaku jujur, dimana kejujuran adalah kunci penting untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam penerapan kebijakan diperlukan upaya-upaya khusus yang dapat menunjang agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila terdapat 4 (empat) faktor yang termuat didalamnya yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut memiliki kaitan antara satu dengan lainnya.

Proses pengkomunikasian kebijakan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui rapat bersama antara kepala sekolah, dewan guru, beserta staf. Selain itu fungsi pelaksanaan rapat selain sebagai upaya dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kebijakan adalah untuk membahas mengenai peran guru dan staf sekolah dalam memberikan tauladan dan contoh bagi peserta didik dalam program pendidikan antikorupsi sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini didukung oleh penelitian yang menjelaskan bahwa program pendidikan antikorupsi dapat disusun dan direncanakan melalui rapat yang dihadiri guru dan staf sekolah untuk menyukkseskan upaya pendidikan antikorupsi tersebut (Yaqin, 2015).

Hasil rapat tersebut akan disosialisasikan kepada peserta didik melalui wali kelas masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan kebijakan kepada siswa yang bertujuan agar dapat terjalin kerja sama yang baik antara siswa dengan guru dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, sehingga dalam hal ini faktor kejelasan dan transmisi dalam proses komunikasi penting untuk dilakukan agar kebijakan yang di buat dapat berjalan secara efektif.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo ditunjang oleh sarana prasarana berupa kantin kejujuran yang terletak di Gedung A dan B, serta adanya poster budaya sekolah yang di tempel pada dinding sekolah. Termasuk adanya kegiatan pendukung program seperti sosialisasi yang berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti Kepolisian, serta kegiatan sekolah yang berupa kegiatan infaq pada hari kamis yang dilakukan setiap satu minggu sekali.

Temuan pada penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Purba dkk (2018) yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan suntikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penalaran obyektif siswa terkait pendidikan antikorupsi. Selain sumber daya manusia sebagai penunjang keefektifan berjalannya suatu kebijakan, diperlukan sumber daya alat dalam hal ini

yaitu fasilitas sebagai media pendukung dalam penerapan kebijakan Pendidikan AntiKorupsi.

Terdapat sumber daya finansial sebagai penunjang dalam pelaksanaan kebijakan, yang mana dalam hal ini sumber dana yang diperoleh oleh sekolah pada mulanya yaitu mendapat bantuan dari dinas pendidikan untuk di kelola menjadi kantin kejujuran, serta dalam pelaksanaan kebijakan penerapan Pendidikan Antiorupsi alokasi waktu yang digunakan yaitu dilaksanakan sesuai dengan jam pembelajaran yang berlangsung di sekolah.

Berdasarkan data temuan di lapangan menyatakan bahwa adanya kantin kejujuran secara tidak langsung membuat peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kantin kejujuran sebagai media dalam penerapan Pendidikan AntiKorupsi dapat membentuk sikap positif dalam diri peserta didik, memperkuat karakter, dan membentuk komitmen dalam diri peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini didukung oleh penelitian Triyanto & Nuryadi (2020) yang menjelaskan bahwa kantin kejujuran adalah sarana untuk membentuk *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan yang sesuai dengan konsep dan pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Penerapan program pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Antartika Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa terdapat strategi atau cara khusus yang dilakukan melalui pengadaan rapat bersama yang membahas RPP terintegrasi untuk penyisipan pendidikan antikorupsi. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Asyafiq (2017) yang meyakini bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui penguatan peran dan fungsi guru mata pelajaran PPKn.

Dalam hal ini RPP digunakan sebagai Standard Operasional Procedure (SOP) dalam struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi. Dimana RPP berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan AntiKorupsi di SMA Antartika Sidoarjo. Dalam RPP memuat pendidikan karakter yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang penerapan pendidikan AntiKorupsi.

Penerapan Pendidikan AntiKorupsi Pada Peserta Didik di SMA Antartika Sidoarjo Yang Berfokus Pada Teori Thomas Lickona

Sesuai dengan hasil yang didapatkan melalui penelitian kuantitatif tersebut, teori Thomas Lickona menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena memberikan sudut

pandang dalam kegiatan pendidikan karakter yang berfokus pada tindakan yang dilandasi oleh moral. Dalam teori Thomas Lickona, yaitu *Moral Knowing*, *Moral Feeling*, dan *Moral Action* tersebut. Dalam penerapannya di studi kasus kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo, ditemukan bahwa siswa dan siswi yang berada di sekolah tersebut menjalankan kegiatan tersebut dengan baik. Dilihat dari hasil penelitian tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak dapat menghasilkan 100% sesuai dengan teori tersebut tapi setidaknya telah mencapai 80% dari teori yang digunakan tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan juga ditemukan bahwa banyak anak-anak yang tidak bertindak curang seperti tidak membayar padahal mengambil makanan atau minuman. Pada observasi ditemukan bahwa banyak anak-anak yang melaksanakan kegiatan ini dengan jujur dan bertanggung jawab karena dalam melaksanakannya mereka lebih mementingkan moral mereka baik dari pengetahuan mereka tentang kejujuran dan rasa tanggung jawab, perasaan mereka yang jika mereka tidak jujur maka akan ada rasa bersalah yang terus menghantuinya serta adanya sikap moral yang mereka pegang teguh karena didasarkan juga pada pengetahuan yang mereka ketahui dan juga perasaan mereka yang masih mengedepankan nilai moral dibandingkan dengan egoisnya mereka.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Antikorupsi Pada Peserta Didik di SMA Antartika Sidoarjo.

Seluruh agen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Antartika Sidoarjo yaitu guru, staf dan peserta didik menyatakan bentuk dukungan dan komitmen penuh pada program ini. Komitmen bersama perlu dibangun dan diberi penguatan untuk mendukung eksistensi kantin kejujuran, sehingga pendidikan antikorupsi dapat berjalan dengan maksimal (Nawawi, 2017).

Bentuk komitmen dapat berupa upaya penguatan nilai-nilai antikorupsi, termasuk membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai porsi masing-masing. Harapannya adanya program pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Antartika Sidoarjo, peserta didik dapat memiliki rasa kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Guru dalam hal ini berperan dalam upaya meningkatkan antusiasme peserta didik dan memberikan materi pelajaran dengan penyisipan nilai-nilai antikorupsi dan nilai moral. Hal ini sesuai dengan penelitian Murdiono (2016) yang menjelaskan bahwa antusiasme siswa dapat dicapai melalui sistem kegiatan belajar mengajar yang bersifat dua arah dan menarik perhatian

siswa, baik secara materi, bahan ajar, maupun metode yang digunakan oleh guru.

Hingga sejauh ini, diketahui bahwa faktor pendukung terselenggaranya pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo dapat diidentifikasi melalui dukungan, komitmen dan partisipasi aktif warga sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian Kristiono dkk (2020) yang menjelaskan bahwa komitmen dan dukungan yang diberikan warga sekolah merupakan faktor pendukung terlaksananya pendidikan antikorupsi di sekolah secara maksimal.

Adapun penghambat dalam proses penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo adalah masih adanya kinerja agen pelaksana yang belum maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Agen sekolah dalam hal ini peserta didik, yang mana hal ini dapat diketahui melalui kamera cctv yang terpasang pada dinding sekolah dan mengarah pada area kantin kejujuran yang berfungsi sebagai fungsi kontroling untuk warga sekolah. Dalam ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kembali perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo.

Hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya solusi yang tepat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ratnasari selaku guru PPKn bahwa solusinya selalu diingatkan terus-menerus, menegur, dan melakukan pendekatan hati ke hati. Hal ini dikarenakan setiap kesalahan yang dilakukan siswa tidak harus selalu dengan cara memarahi, menegur, tetapi kadang justru yang diperlukan siswa sebenarnya pendekatan-pendekatan seperti kekeluargaan. Dengan cara seperti itu siswa dapat menceritakan mengapa ia melakukan kesalahan tersebut, dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran mengenai hambatan pelaksanaan pendidikan antikorupsi, maka diketahui bahwa solusi dari adanya faktor penghambat tersebut adalah dengan melakukan rapat bersama, guru senantiasa mengingatkan dan memperkuat pendidikan karakter ditengah menyampaikan materi pelajaran di kelas, serta menjadwalkan ulang apabila terdapat sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak luar.

PENUTUP

Simpulan

Pendidikan antikorupsi memiliki nilai urgensi yang dirasa sangat penting untuk diterapkan. Salah satunya melalui keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi secara kritis dan solutif. Hal tersebut dilihat dari adanya pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Antartika Sidoarjo diberlakukan sejak tahun 2013. Melalui program kantin

kejujuran. Program ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya SMA Antartika diberikan wewenang untuk mengelola kantin kejujuran sebagai media untuk membentuk karakter antikorupsi pada peserta didik di sekolah. Dalam pelaksanaan ini, para peserta didik sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik karena dalam pelaksanaan tersebut para peserta didik masih mengedepankan moral mereka. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan kategori *moral knowing* didapatkan siswa telah melaksanakannya hingga 80% dari nilai total maksimum yang seharusnya. Untuk kategori *moral feeling* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan hati nurani dan empatinya sebesar 81%, dan terakhir untuk kategori *moral action* didapatkan siswa telah melaksanakan kegiatan kantin kejujuran dengan nilai moral yang baik sebesar 80% dari nilai total maksimum. Rata-rata setiap kategori sudah melaksanakannya sesuai teori yang digunakan yaitu rata-rata 80% dan itu merupakan hasil yang sangat baik, mengingat ini adalah langkah awal dalam memberikan pendidikan karakter kepada para generasi penurus bangsa.

Hubungan yang terjadi antara kategori yang diteliti juga menunjukkan hal yang baik. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral feeling* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.876 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah Kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral knowing* dengan *moral action* didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.764 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat. Untuk hubungan antara kategori *moral feeling* dengan *moral action* adalah sebesar 0.864 dan berdasarkan dengan interval koefisien korelasi maka hubungan antara kategori tersebut adalah kuat. Seluruh hubungan yang terjadi tiap kategori menunjukkan hubungan yang kuat sehingga dalam penerapannya sudah memberikan dan menunjukkan hal yang baik.

Faktor pendukung dalam pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo adalah konsistensi dukungan dan komitmen yang diberikan oleh semua agen yang terlibat. Adapun faktor penghambat dalam proses penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di SMA Antartika Sidoarjo adalah masih adanya kinerja agen pelaksana yang belum maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga solusi dari adanya faktor penghambat tersebut adalah dengan melakukan rapat bersama, guru senantiasa mengingatkan dan memperkuat pendidikan karakter ditengah menyampaikan materi pelajaran di kelas, serta menjadwalkan ulang apabila terdapat sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak luar.

Saran

Berdasarkan temuan pada penelitian, maka rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah untuk pihak sekolah diharapkan dapat memperbaiki faktor-faktor yang telah menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kantin kejujuran tersebut, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimum dan juga untuk dapat meningkatkan pendidikan karakter di sekolah dalam rangka melawan korupsi dan menghapus korupsi pada generasi selanjutnya, dan untuk para peserta didik dapat diharapkan dapat melaksanakan kegiatan kantin kejujuran ini dengan baik karena hal tersebut merupakan salah satu pendidikan karakter yang dijalankan di sekolah, serta untuk pihak orangtua, selain sekolah sebagai tempat pendidikan formal dirumah juga merupakan tempat terbaik untuk mendapatkan pendidikan non-formal dari orang tua maka sudah sewajarnya orang tua dapat memberikan contoh yang baik terkait dengan pendidikan karakter anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Imelda Frimayanti. 2017. Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8(1).
- Anam, K., & Sakiyati, I. D. 2019. Kantin Kejujuran sebagai Upaya dalam Pembentukan Karakter. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 13(1): 21-32
- Ariawan, I. G. K. 2018. Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acrtia Comitas*, 1(1), 17-25. <https://media.neliti.com/media/publications/242066-meningkatkan-kesadaran-generasi-muda-unt-4cbc4de2.pdf>
- Arrahim, A. 2016. Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Kantin Kejujuran. *Jurnal Civic Hukum* 1(2): 49-55
- Asyafiq, S. 2017. Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14(2): 166-175
- Aziizu, B. Y. A. 2015. Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 295-300. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>
- CNN Indonesia. 2021. Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot Urutan 102 dari 180. Di Akses pada 2 Januari 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>

- Eko, Handoyo. 2010. Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 14(2).
- Gunarto, W. (2017). Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 119–130. <https://media.neliti.com/media/publications/322322-upaya-melepas-budaya-korupsi-yang-telah-3432fc99.pdf>
- Gurning, L. N. M., Mudjiman, H., & Haryanto, S. 2014. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2(1): 93-102.
- Harmid, Darmadi. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan Rusdi. 2015. Penerapan pendidikan antikorupsi di kampus sebagai bagian integral dari pendidikan karakter. *Jurnal pendidikan* 13(2): 313-327
- I Ayu, Gusti Eviani Yuliantri. 2015. Pembentukan KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Undiknas: Jurnal Hukum* 2(2).
- Instruksi Presiden (INPRES) No.17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- Ita Suryani. 2013. Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi* XII(2): 308-322
- Kristiono, N., Astuti, I., & Rafiuddin, H. 2020. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemasang. *Integralistik* 31(1): 13-21
- Mashabi, Sania. 2021. ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I Di 2020. Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>
- Murdiono, M. 2016. Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15(1): 166-184
- Natawijaya, Rochman. 1977. *Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. Jakarta: Eneka Cipta.
- Nawawi, I. 2017. Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* 25(1): 12-17
- Nur Syurya. 2021. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal ilmu pendidikan* 6(2): 111-115
- Paizal, P. 2020. Penerapan Kurikulum Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Contemplate* 1(1): 66-75
- Purba, N., Zaini, S., & Fitriani, E. 2018. Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Madrasah untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 133-140
- Ridwan, R. 2015. Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3): 547–556. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.126>
- Shobirin, M. 2016. Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendas*, 1(2), 107–117. <https://doi.org/10.30659/pendas.1.2.107-117>
- Subkhan, E. 2020. Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6(1): 15-30
- Sugiyono. 2010. Uji Hipotesis. *Sugiyono*.
- Sukmadinata, N.S. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutrisno. 2017. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics* 14(2): 166-175
- Transparency International Indonesia. 2020. *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi*. Transparency International. <http://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- Triyanto, T., & Nurhadi, M. H. 2020. Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Pembentuk Civic Disposition. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8(1): 15-37
- Uswatun Hasanah. 2018. Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1): 1-13
- Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., & Ariawan, I.G.K. 2018. Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas* 3(1): 17-25
- Widyastono Herry. 2013. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal teknodik* 17(2)
- Yaqin, N. 2015. Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2(2): 267-286